

ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI ANTARA WILAYAH UTARA DAN SELATAN PROVINSI JAWA TIMUR

Warda

Fakultas Ekonomi, Unesa, Kampus Ketintang Surabaya

This research aimed to know disparity of economic growing in East Java Province between Regency. The data was analyzed with Kuadran System, Williamson Indeks, Entrophy Theil Indeks and the proof of Kuznets Hypothesis. Sampel taken by using technique survey all regency in East Java Province, the sampel divide into two part, North-Side and South-side East Java Province.

From the research, can conclusion that in 2011 Kediri city, Malang city, Madiun city, Surabaya city and Gresik regency are in First Kuadran (high growth and high income). The area that categorize into high income but low growth are Sidoarjo regency, Probolinggo city and Mojokerto city. Malang, Mojokerto, Bojonegoro, Tuban regency and Batu city can categorized into high growth but low income, meanwhile the area categorized into low income and low growth are Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Lumajang, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Jombang, Nganjuk, Magetan, Lamongan, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Blitar, Kediri, Ngawi, Jember and Madiun regency and also two city they are Pasuruan and Blitar. According to Williamson Index, East Java Province have increasing disparity in growing of economic but Entrophy Theil Index categorized that East Java Province have decreasing disparity of growing in economic. Based on Williamson and Entrophy Theil Index, East Java Province is not categorized based on Kuznets Hypothesis.

Keywords: *Income, Growth, Disparity development*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketimpangan pembangunan ekonomi antar kabupaten yang terjadi di Provinsi Jawa Timur. Teknik analisa data menggunakan sistem Kuadran (Tipologi Klassen), Indeks Williamson, Indeks Entropi Theil, dan Hipotesis Kuznets. Teknik sampel yang digunakan adalah seluruh kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jawa Timur, sampel tersebut dibagi menjadi dua bagian, wilayah utara dan wilayah selatan Provinsi Jawa Timur.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2011, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Madiun, Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya berada dikuadran I (pertumbuhan dan pendapatan yang tinggi). Wilayah yang termasuk kategori berpendapatan tinggi, namun pertumbuhannya rendah antara lain Kabupaten Sidoarjo, Kota Probolinggo dan Kota Mojokerto. Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten

Bojonegoro, Kabupaten Tuban dan Kota Batu dapat dikategorikan di daerah yang pertumbuhannya tinggi namun berpendapatan rendah. Sedangkan wilayah yang termasuk kategori berpendapatan rendah dan pertumbuhan ekonomi rendah adalah Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Lumajang, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Jombang, Nganjuk, Magetan, Lamongan, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Blitar, Kediri, Ngawi, Jember, Madiun, serta Kota Pasuruan dan Kota Blitar. Berdasarkan Indeks Williamson, Provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan ketimpangan pembangunan ekonomi, namun berdasarkan Indeks Entropi Theil Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan ketimpangan pembangunan ekonomi. Berdasarkan Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil, Hipotesis Kuznets tidak berlaku di Provinsi Jawa Timur.

Kata kunci: *PDRB, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pembangunan*

Indonesia merupakan negara dengan tingkat keberanekaragaman yang tinggi, dimana setiap daerah memiliki potensi alam, ekonomi sosial dan budaya yang berbeda-beda. Beragamnya potensi dan karakteristik sumber daya tersebut menyebabkan tidak meratanya pembangunan antar daerah. Pembangunan yang dilakukan di setiap wilayah pada hakekatnya membutuhkan pertumbuhan, efisiensi, pemerataan dan berkelanjutan.

Keberhasilan suatu pembangunan dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain aspek sosial budaya, hukum, pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan, serta pengentasan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator keberhasilan pembangunan yang umum karena dapat diukur secara kuantitatif dan mendorong

aspek pembangunan lainnya. Jika pertumbuhan berlangsung secara efektif dan berkelanjutan, maka daerah-daerah lain akan terpacu untuk tumbuh dan berkembang (Mopangga, 2010)

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur menempati posisi ke delapan dari tiga puluh tiga provinsi di Indonesia. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur mengungguli provinsi lain yang berada di Pulau Jawa. Namun dibalik tingginya pertumbuhan ekonomi tersebut, ketimpangan pembangunan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur pun cukup tinggi. Daerah perkotaan dan kabupaten di sekitar Kota Surabaya pada umumnya memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi, serta tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan kabupaten yang terletak di bagian

selatan Jawa Timur, daerah tapal kuda serta Madura.

Secara umum laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2011, sebagian besar kabupaten/kota yang berada di wilayah utara Jawa Timur memiliki pertumbuhan ekonomi di atas angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur (7,22 persen). Kabupaten/kota tersebut antara lain: Kabupaten Tuban (7,24 persen), Kabupaten Bojonegoro (9,20 persen), Kabupaten Gresik (7,39 persen), Kota Surabaya (7,65 persen), Kabupaten Mojokerto (7,23 persen), Kabupaten Malang (7,35 persen), Kota Kediri (7,93 persen), Kota Malang (7,22 persen), Kota Madiun (7,29 persen) dan Kota Batu (8,17 persen). Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi di bawah angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur, mayoritas berada di wilayah selatan Jawa Timur dan Madura.

Selain menggunakan laju pertumbuhan ekonomi, perbedaan tingkat pendapatan per kapita bisa menjadi salah satu indikasi adanya ketimpangan pembangunan wilayah utara dan selatan Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, rata-rata Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Provinsi Jawa Timur tahun 2009 sampai 2011 sebesar Rp 20,32 juta. Kabupaten/kota yang memiliki rata-rata PDRB per kapita di atas Provinsi Jawa Timur antara lain: Kota Surabaya (Rp 76,73 juta), Kota Madiun (Rp 29,29 juta), Kota Mojokerto (Rp 23,83 juta), Kota Probolinggo (Rp 22,15 juta), Kota Malang (Rp 39,45 juta), Kota Kediri (Rp 228,7 juta), Kabupaten Gresik (Rp 33,38 juta) dan Kabupaten Sidoarjo (Rp 30,92 juta). Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki rata-rata PDRB per kapita relatif rendah pada tahun 2009 sampai 2011 di bawah Rp 10 juta antara lain: Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Kediri, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Pamekasan.

Perbedaan tingkat pendapatan per kapita yang sangat mencolok ini menjadi salah satu indikasi adanya ketimpangan pembangunan yang diakibatkan oleh tingginya konsentrasi aktivitas ekonomi pada pusat-pusat pertumbuhan wilayah tersebut. Wilayah yang memiliki rata-rata PDRB per kapita yang relatif tinggi

juga mendominasi wilayah utara Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, Madura terletak di bagian utara Provinsi Jawa Timur namun pertumbuhan ekonominya belum berkembang secara maksimal.

Kesenjangan antara wilayah utara dan selatan Provinsi Jawa Timur tidak bisa dipungkiri, akibat alokasi pembangunan bertumpu di wilayah utara. Proyek pembangunan jalan terpusat di wilayah utara, sedangkan di wilayah selatan sebagian besar masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan listrik. Kesenjangan keadaan tersebut menyebabkan wilayah utara menanggung beban lingkungan dan sosial, sebagai konsekuensi pusat-pusat perekonomian di wilayah utara. Demikian pula dengan daya dukung infrastruktur yang semakin hari semakin kurang memadai (seiring pesatnya pertumbuhan penduduk). Jalur distribusi yang bertumpu di wilayah utara mengakibatkan jalan-jalan di wilayah utara semakin cepat rusak dan upaya pengembangan infrastruktur baru berhadapan dengan kebutuhan ketahanan pangan dimana lahan-lahan pertanian perlu tetap dipertahankan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan pembangunan ekonomi antara kabupaten/kota yang berada di wilayah utara dan selatan Provinsi Jawa Timur. Ketimpangan ekonomi antar daerah antara potensi dan tingkat kesejahteraan tersebut dapat menimbulkan masalah dalam hubungan antar daerah. Arus modal mempunyai logika sendiri untuk berakumulasi di lokasi-lokasi yang mempunyai prospek tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dan tingkat risiko yang lebih rendah, sehingga tidak dapat dihindari jika arus modal lebih terkonsentrasi di daerah-daerah kaya sumber daya alam, dan kota-kota besar yang prasarananya lebih lengkap. Untuk itulah diperlukan pembangunan daerah yang merupakan bagian dari pembangunan nasional. Untuk meningkatkan pembangunan nasional harus didukung dengan perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dalam rangka mewujudkan keserasian dan keseimbangan pembangunan nasional.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pertumbuhan ekonomi di

Provinsi Jawa Timur pada tahun 2009 sampai 2011?, (2) Bagaimana struktur pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur menurut Tipologi Klassen?, (3) Seberapa besar tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi antara wilayah utara dan selatan Provinsi Jawa Timur?, (4) Apakah Hipotesis Kuznets berlaku di Provinsi Jawa Timur ?, (5) Kebijakan apa yang dapat direkomendasikan kepada pemerintah daerah untuk mengurangi ketimpangan pembangunan yang terjadi antara wilayah utara dan selatan Provinsi Jawa Timur?.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang. Dalam hal ini proses mendapat penekanan karena mengandung unsur dinamis. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dengan penambahan Produk Domestik Bruto (PDB) dan PDRB saja, melainkan juga diberi nilai yang bersifat immaterial seperti kenikmatan, kepuasan dan kebahagiaan dengan rasa aman dan tentram yang dirasakan oleh masyarakat (Arsyad, 2010:143).

Pada umumnya pembangunan selalu disertai dengan pertumbuhan, namun pertumbuhan belum tentu

disertai dengan pembangunan. Keberhasilan program pembangunan di negara sedang berkembang sering dimulai berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan *output* dan pendapatan nasional. Menurut Smith, pertumbuhan merupakan sebuah proses yang bersifat kumulatif. Apabila kemakmuran sebagai akibat kemajuan di bidang pertanian, industri manufaktur dan perniagaan, kemakmuran itu akan menarik ke pemupukan modal, kemajuan teknik, meningkatnya penduduk, perluasan pasar, pembagian kerja, dan kenaikan keuntungan secara terus menerus (Jhingan 2010:84).

Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi pada umumnya dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai perbaikan sistem kelembagaan Arsyad (2010:58). Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Tujuan utama pembangunan ekonomi adalah menciptakan tingkat

pertumbuhan PDB dan diikuti dengan pemberantasan kemiskinan, penanggulangan ketimpangan, penyediaan lapangan kerja, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan standar hidup kesehatan dan nutrisi.

Pembangunan Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola setiap sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 2010:354).

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah menggerakkan otonomi daerahnya untuk bekerjasama dengan masyarakat dan sektor swasta dalam mengelola sumber daya yang ada. Adanya kerjasama ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan perekonomian yang merata di wilayah tersebut.

Penelitian Terdahulu

Penelitian ketimpangan pembangunan ekonomi telah dilakukan oleh Miradani dengan judul Perencanaan Pembangunan Agroindustri Provinsi Jawa Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi ketimpangan wilayah Jawa Timur melalui kajian keterkaitan sektoral wilayah antar kota dan kabupaten.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah daerah tertinggal paling besar di Pulau Jawa. Delapan kabupaten dinyatakan tertinggal karena kurang memenuhi aksesibilitas, infrastruktur, kemiskinan, IPM dan skala fiskal. Kabupaten tertinggal berlokasi di wilayah selatan Jawa Timur. Penelitian ini memiliki implikasi bahwa daerah perkotaan dan kabupaten di sekitar Kota Surabaya pada umumnya memiliki pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten yang terletak di bagian selatan Jawa Timur dan daerah Tapal Kuda. Sedangkan delapan kabupaten yang berada di wilayah selatan Jawa Timur termasuk daerah tertinggal.

Penelitian yang dilakukan oleh Prapti dalam judul Keterkaitan antara

Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pola keterkaitan tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesenjangan pendapatan di kabupaten/kota di Jawa Tengah. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa: (1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan diikuti dengan meningkatnya kesenjangan pendapatan penduduk di sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Tengah. (2) Selama periode tahun 2001-2004, sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Tengah mengalami pergeseran tipologi keterkaitan antara tingkat pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kesenjangan pendapatan (pergeseran posisi kuadran).

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan analisis data sekunder. Cakupan wilayah penelitian adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, meliputi 29 wilayah kabupaten dan 9 kota. Kawasan Pantai Selatan (Pansela) Jawa Timur terdiri dari 8 kabupaten yaitu: Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, dan

Banyuwangi. Sedangkan wilayah utara Provinsi Jawa Timur terdiri dari 21 kabupaten/kota, antara lain Kabupaten: Ponorogo, Kediri, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep dan Kota: Kediri, Blitar, Malang, Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Madiun, Surabaya dan Batu.

Model analisis yang digunakan antara lain: (1) Tipologi Klassen yang digunakan peneliti untuk mengetahui pola dan struktur pertumbuhan ekonomi, (2) Indeks Williamson yang digunakan peneliti untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi, (3) Hipotesis Kuznets yang digunakan peneliti untuk mengetahui apakah terdapat relasi antara tingkat kesenjangan pendapatan dan tingkat pendapatan per kapita yang berbentuk kurva U-Terbalik. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan yang diperoleh berdasarkan buku dan literatur yang relevan, serta studi lapangan dengan menggunakan teknik dokumentasi dari instansi Badan Pusat Statistik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

Pertumbuhan Ekonomi Jatim

Letak geografis Provinsi Jawa Timur yang berada di wilayah strategis sangat menguntungkan bagi perkembangann ekonomi Jawa Timur. Berikut ini laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur periode tahun 2009 sampai 2011.

Pada tahun 2009 kondisi pasar kurang kondusif sebagai dampak dari krisis, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,01% persen, didukung oleh pertumbuhan pada sektor pengangkutan dan komunikasi yang mampu tumbuh sebesar 12,14 persen, sektor pertambangan dan penggalian 7,06 persen dan sektor jasa sebesar 6,65 persen. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur tahun 2010 mengalami pemulihan setelah adanya krisis global. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur meningkat menjadi 6,68 persen di tahun 2010 dan lebih besar dibanding pertumbuhan ekonomi

nasional yakni sebesar 6,2 persen, didukung oleh pertumbuhan pada sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 10,67 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 10,07 persen dan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 9,18 persen. Perekonomian Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011 menunjukkan kinerja yang semakin meningkat. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur tumbuh menjadi 7,22 persen. Pertumbuhan ini didukung oleh pertumbuhan pada sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 10,67 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 10,07 persen dan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 9,18 persen.

Tipologi Klassen

Tipologi Klassen digunakan untuk menentukan klasifikasi daerah berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita. Berikut ini Tipologi Klassen Provinsi Jawa Timur tahun 2011.

Tabel 4.4 Klasifikasi Daerah Menurut Tipologi Klassen kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2011

<p>Kuadran III (ri >r) tapi (yi<y) kota/kabupaten cepat berkembang</p> <p>Kab Malang, Kab Mojokerto, Kab Bojonegoro, Kab Tuban, Kota Batu</p>	<p>Kuadran I (ri >r) dan (yi>y) kota/kabupaten cepat maju dan cepat tumbuh</p> <p>Kota Kediri, Kota Malang, Kota Madiun, Kab Gresik, Kota Surabaya</p>
<p>Kuadran IV (ri<r) dan (yi<y) kota/kabupaten relatif tertinggal</p> <p>Kab Pacitan, Kab Ponorogo, Kab Trenggalek, Kab Tulungagung, Kab Lumajang, Kab Banyuwangi, Kab Bondowoso, Kab Probolinggo, Kab Lamongan, Kab Bangkalan, Kab Sampang, Kab Pamekasan, Kab Sumenep, Kab Madiun, Kab Nganjuk, Kab Magetan, Kab Situbondo, Kab Pasuruan, Kab Jombang, Kota Pasuruan, Kab Blitar, Kab Kediri, Kab Ngawi, Kota Blitar, Kab Jember</p>	<p>Kuadran II (ri<r) tapi (yi>y) kota/kabupaten maju tertekan</p> <p>Kab Sidoarjo, Kota Probolinggo, Kota Mojokerto</p>

Sumber: diolah oleh peneliti, 2013

Sedangkan pola pergeseran Tipologi Klassen untuk periode 2009 sampai 2011 diperoleh dari perbandingan antara rata-rata laju pertumbuhan dan rata-rata pendapatan per kapita tiap kabupaten/kota dengan Provinsi Jawa Timur. Hasil Tipologi periode 2009 sampai 2011 menunjukkan perbedaan dengan hasil Tipologi Klassen tahun 2011.

Adapun rincian kabupaten/kota yang mengalami pergeseran antara lain: (1) Pada tahun 2011 Kota Kediri berada di kuadran I, namun pada periode tahun

2009 sampai 2011 bergeser ke kuadran II. Minimnya investasi mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Kota Kediri lamban. Meski di kota Kediri memiliki 3 perusahaan besar yaitu perusahaan rokok Gudang Garam dan dua perusahaan Gula yakni PG Merican serta PG Pesantren Baru dalam menopang kegiatan ekonomi, namun hal itu belum memadai untuk pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri. Selama ini laju perekonomian masih dikuasai oleh para pemodal besar sedangkan usaha dari rakyat kelas ekonomi menengah ke

bawah masih minim. (2) Kabupaten yang mengalami pergeseran dari kuadran III ke kuadran IV adalah: Kabupaten Tuban. Sektor ekonomi yang memiliki peran besar dalam pembentukan PDRB adalah sektor pertanian. Sektor pertanian dalam perkembangannya mengalami penurunan peranan sektoral dalam pembentukan PDRB. Sektor pertanian pada tahun 2010 menyumbang sebesar 24,65 persen terhadap PDRB, namun pada tahun 2011 menurun menjadi 24,64 persen. Apabila sebuah sektor mempunyai kontribusi besar dan pertumbuhannya lambat, maka akan menghambat tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. (3) Kabupaten yang mengalami pergeseran dari kuadran IV ke kuadran III adalah: Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Lamongan. Kabupaten Trenggalek memiliki pelabuhan ikan terbesar setelah Cilacap di Pantai Selatan Pulau Jawa.

Adanya pengembangan Jalan Lintas Selatan (JLS), pengembangan potensi perikanan mulai direalisasikan dengan pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Pantai Prigi. Sektor pertanian (perikanan) dan sektor perdagangan, hotel restoran mengalami peningkatan pada periode

2009 sampai periode 2011. Sedangkan di Kabupaten Lamongan terjadi penurunan jumlah pengangguran pada periode 2009 sampai 2011. Tingkat pengangguran di Kabupaten Lamongan setiap tahun terus menurun secara signifikan, Adanya penurunan jumlah pengangguran ini mengakibatkan kemajuan aktivitas ekonomi. Sedangkan kabupaten/kota yang lainnya tidak mengalami pergeseran kuadran (statis).

Indeks Ketimpangan

Dari hasil penelitian diketahui bahwa besarnya ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Timur semakin meningkat dari tahun 2009 sampai 2011. Ketimpangan pembangunan antara wilayah selama tahun 2009 sampai 2011 dapat dianalisis dengan menggunakan Indeks Williamson. Dalam hal ini Indeks Williamson dapat dilihat pada tabel berikut

Tahun	IW Jatim	IW Utara	IW Selatan
2009	1,23	1,21	0,16
2010	1,24	1,23	0,21
2011	1,36	1,39	0,20

(Sumber: diolah oleh peneliti, 2013)

Kemajuan pembangunan di wilayah utara bukan berarti pemerataan pembangunan juga terjadi, ketimpangan pun juga semakin melebar. Adanya

pemusatan aktivitas ekonomi yang terjadi pada sebagian kota besar di wilayah utara menyebabkan disparitas pembangunan ekonomi. Wilayah selatan Provinsi Jawa Timur memiliki nilai ketimpangan yang relatif rendah (tidak mencapai 1). Setiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan yang tidak terlalu signifikan.

Penelitian Miradani juga menunjukkan bahwa Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah daerah tertinggal paling besar di Pulau Jawa. Delapan kabupaten dinyatakan tertinggal karena kurang memenuhi aksesibilitas, infrastruktur, kemiskinan, IPM dan skala fiskal. Kabupaten tertinggal berlokasi di wilayah selatan Jawa Timur.

Dalam Laporan Akhir Evaluasi Kinerja Pemerinah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2011, ketimpangan pembangunan ekonomi tersebut disebabkan adanya beberapa faktor antara lain ketergantungan banyak wilayah pada Kota Surabaya dan sekitarnya yang disebabkan oleh terkonsentrasinya kegiatan perekonomian di wilayah Surabaya. Provinsi Jawa Timur memiliki jaringan jalan di utara dan selatan, namun infrastruktur dan prasarana di wilayah

selatan yang tidak memadai. Pergerakan lalu lintas barang dan manusia di wilayah utara lebih cepat dibandingkan wilayah selatan. Jaringan jalan sangat berperan untuk menjamin kelancaran pergerakan barang antara kawasan produksi menuju kawasan pemasaran maupun mobilitas penduduk antar pusat-pusat permukiman. Faktor lain yakni dari aspek geologis. Wilayah Provinsi Jawa Timur selatan merupakan pertemuan lempeng tektonik sehingga menjadikan wilayah ini rawan bencana. Kondisi geologis berpengaruh pada pola pemukiman dan aktivitas perekonomian.

Hipotesis U-Terbalik Kuznets

Simon Kuznets membuat hipotesis adanya Kurva U-Terbalik bahwa pada awal ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan makin merata (Kuncoro,2006:150). Hipotesis Kuznets dapat dibuktikan dengan cara membuat grafik antara pertumbuhan PDRB dengan angka indeks ketimpangan baik Indeks Williamson maupun Indeks Entropi Theil.

Tabel 4.7 Pertumbuhan ekonomi, Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil tahun 2009 sampai 2011

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	IW	IET
2009	5,01	1,23	2,35
2010	6,68	1,24	2,19
2011	7,2	1,36	2,20

Sumber: diolah oleh peneliti, 2013

Dari hasil penelitian, Kurva U-Terbalik Kuznets tidak berlaku di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2009 hingga 2011 karena gambar grafik tidak berbentuk huruf U terbalik.

Kebijakan pemerintah

Beberapa penelitian terdahulu dan hasil evaluasi instansi terkait pembangunan daerah telah merumuskan strategi kebijakan pemerintah untuk mengurangi ketimpangan wilayah utara dan selatan, kebijakan tersebut antara lain: (1) Mengembangkan sektor-sektor yang memiliki peranan besar terhadap pertumbuhan ekonomi agar dapat meningkatkan lapangan pekerjaan di daerah relatif tertinggal, (2) pengembangan agribisnis dengan basis padat karya di kawasan utara dan selatan serta Madura agar dapat meningkatkan daya saing dari komoditi yang

dihasilkan oleh daerah tersebut, (3) Pengembangan UMKM/IKM dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat kawasan utara dan selatan serta Madura di Provinsi Jawa Timur, (4) Pembangunan infrastruktur strategis diantaranya: pembangunan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur; pembangunan infrastruktur Pasca Suramadu; pembangunan Terminal Peti Kemas; dan pembangunan Jalan Tol di Jawa Timur dan infrastruktur transportasi lainnya, (5) Pembangunan Jalan Lintas Selatan yang membentang sepanjang pesisir Selatan Jawa Timur, mulai Kabupaten: Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember dan Banyuwangi (PACIWANGI) yang diharapkan dapat meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat wilayah Selatan Jawa Timur; meningkatkan aksesibilitas antar Kota, aksesibilitas daerah-daerah terpencil kepada pusat-pusat pelayanan umum, sehingga akan meningkatkan pelayanan kepada lapisan masyarakat; mampu membuka peluang bagi pengembangan kegiatan ekonomi, pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan sentra-sentra produksi; meningkatkan aksesibilitas pada koridor dan kawasan-kawasan produktif, sehingga mampu

menekan ongkos produksi; dan membuka kawasan-kawasan/obyek wisata potensial, sehingga mampu merangsang pengembangan kegiatan ekonomi kerakyatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2009 sampai 2011 mengalami peningkatan setelah mengalami krisis global, kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dapat dibagi menjadi empat klasifikasi dengan menggunakan Tipologi Klassen, selama periode 2009 sampai 2011 Indeks Williamson mengalami kenaikan dan secara parsial angka Indeks Williamson untuk wilayah utara cenderung lebih tinggi dibanding wilayah selatan, berdasarkan hubungan Indeks ketimpangan dengan pertumbuhan ekonomi, hipotesis kurva U-Terbalik tidak berlaku di Jawa Timur, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi ketimpangan antara lain: mengembangkan sektor yang memiliki peranan besar terhadap pertumbuhan ekonomi, pengembangan agribisnis

padat karya, pengembangan UMKM serta pembangunan infrastruktur strategis Jalur Lintas Selatan.

Saran

Untuk mengejar keteringgalan di wilayah selatan, pemerintah daerah hendaknya mempercepat penyelesaian Jalur Lintas Selatan. Pembangunan berbagai infrastruktur tidak hanya selalu terfokus di kawasan Kota Surabaya. Peranan Jalur Lintas Selatan sangat berperan penting untuk membangun perekonomian kawasan selatan, sebab kawasan selatan memiliki potensi kekayaan alam melimpah yang dapat dikembangkan, seperti potensi perikanan laut, pertambangan emas dan pariwisata. Dengan bangkitnya perekonomian wilayah selatan, maka tingkat ketimpangan Provinsi Jawa Timur dapat diminimalisir. Secara geologis, wilayah selatan rawan akan bencana alam sehingga diperlukannya strategi penataan ruang yang dapat menjadi alternatif pencegahan bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pemerintah tidak terfokus untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam waktu yang relatif singkat tanpa diiringi pemerataan dan pembangunan berkelanjutan,

pertumbuhan yang tidak berkualitas akan semakin memperlebar ketimpangan pembangunan antar wilayah. Perlu adanya fokus pembangunan sumberdaya manusia dari segi pendidikan, kesehatan dan distribusi pendapatan terutama di daerah yang relatif tertinggal.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur. 2012. *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2012*. Surabaya: BPS
- Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur. 2012. *Data Makro Sosial Dan Ekonomi Jawa Timur 2011*. Surabaya: BPS
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2011. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tuban 2011, (online)*, (www.bps.go.id, Diakses 27 April 2013)
- Jhingan. 2010. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kuncoro, Mudrajad. 2006. *Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. Jogjakarta: UPP STIM YKPN
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduouse Media
- Sukirno, Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, Dan Dasar Kebijakan*. Edisi Kedua. Jakarta: Kencana
- Tim Penyusun. 2006. *Panduan Penulisan dan Penilaian Skripsi*. Surabaya: Unesa University Press
- Todaro, Michael. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.
- Universitas Brawijaya. 2011. *Laporan Akhir Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011*. (Online), (www.bappenas.go.id, diakses 1 Mei 2013)
- Miradani, Sukma. 2010. Analisis Perencanaan Pembangunan Agroindustri Provinsi Jawa Timur. *Majalah Ekonomi*, (Online), tahun XX, No 2 Agustus 2010. Hal : 119-135 (<http://repository.ipb.ac.id>, diakses 10 Januari 2013)
- Pemerintah Kabupaten Trenggalek. 2011. *Perubahan Rencana Kerja*

*Pemerintah Daerah (RKPD)
Tahun 2011, (Online),
(www.trenggalekkab.go.id,
diakses 1 Mei 2013)*

Irawan, Dedi. 2010. “Minimnya
Investasi, Pertumbuhan Ekonomi
Kota Kediri Lamban”. KediriJaya,
edisi 15 Februari 2010,
(<http://www.kedirijaya.com/>,
diakses 9 Mei 2013)

Subhan, Mohammad. 2009. “Kawasan
Selatan, Wajah Ketakberdayaan”.
KOMPAS. (*Online*), edisi 27
April 2009,
(<http://lipsus.kompas.com/>,
diakses 3 Februari 2013)

Tarmizi, Tasrief. 2012. “Lima kabupaten
di Jatim kategori daerah
tertinggal”. Antara News,
(*online*), edisi 18 November 2012,
(<http://antaranews.com/>, diakses
25 Januari 2013)